JuSS: Jurnal Sosial Soedirman
Vol.7, No.2, 2024

De-growth: A Practical Path to Just Sustainability

De-growth sebagai Tawaran Praksis untuk Pembangunan Berkelanjutan yang Lebih Adil

Praja Firdaus Nuryananda[1], Novita Putri Rudiany[2], Arva Rizqullah Hamdan[3], Isynariyah Zein[4], Thufailah Nafiisah Bilqis[5]
[1,2] Yayasan Abyakta Acitya Bhumi
[2] Universitas Pertamina
[4,5] UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak:
Saat ini terdapat tantangan dan kontradiksi yang dihadirkan ekonomi hijau, serta derivasinya yaitu green growth, diantaranya adalah fenomena greenwashing dan paradoks keberlanjutan. Artikel ini berusaha mengenalkan kembali sekaligus melakukan amplifikasi akademis pada gagasan de-growth, yang pernah menjadi manifestasi pemulihan pasca-pandemi pada tahun 2020 sebagai bentuk re-orientasi ekonomi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. De-growth akan memberikan urgensi kepada stakeholders untuk melakukan refleksi pembangunan hijau yang telah dilakukan. Artikel yang ditulis dengan pendekatan kualitatif dan instrumen studi kepustakaan ini, juga memotret de-growth secara global dan di Indonesia, khususnya untuk sektor pariwisata dengan contoh di Raja Ampat dan Nusa Penida. Hasil penelitian ini adalah deskripsi penerapan de-growth sebagai prinsip ekonomi di Raja Ampat dan Nusa Penida melalui pembatasan jumlah wisatawan, zonasi kawasan, dan pelibatan masyarakat lokal yang ada.

Kata-Kata Kunci: **ekonomi hijau, de-growth, pembangunan berkelanjutan,** pariwisata

Abstract:
There are challenges and contradictions presented by the green economy, and its derivative, namely green growth, including the phenomenon of greenwashing and the sustainability paradox. The green economy has the potential to cause technological determinism in sustainable development. This article attempts to reintroduce and amplify the idea of de-growth, which was once a manifestation of post-pandemic recovery in 2020 as a form of economic re-orientation towards sustainable development. This article, written with a qualitative approach and literature study instruments, also portrays de-growth globally and in Indonesia, especially for the tourism sector with examples in Raja Ampat and Nusa Penida. We can examine the application of de-growth as an economic principle in Raja Ampat and Nusa Penida through restrictions on the number of tourists, zoning areas, and the involvement of existing local communities.

Keywords: green economy, de-growth, sustainable development, tourism

Korespodensi:
Praja Firdaus Nuryananda (firdaus.praja@gmail.com)

Pendahuluan

Konsep ekonomi hijau, yaitu pergeseran paradigma global yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sembari meminimalkan dampak lingkungan, telah memperoleh perhatian signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Dewi, 2023). Para pendukung konsep tersebut berpendapat bahwa konsep ini menghadirkan jalur yang lebih layak dan masuk akal menuju pembangunan berkelanjutan dengan janji akan koeksistensi yang harmonis antara kemakmuran ekonomi dan pelestarian ekologi (Leanerts, Tagliapietra, & Wolff, 2022). Namun, nampaknya janji dan harapan tersebut tidak sepenuhnya baik, paling tidak dalam pengamatan kami dan tidak hanya spesifik pada konteks Indonesia. Terdapat tantangan dan kontradiksi yang dihadirkan ekonomi hijau saat ini, termasuk fenomena greenwashing dan paradoks keberlanjutan. Tidak hanya itu, sudah hampir dua dekade ini konsep ekonomi hijau kurang diberikan gagasan anti-tesisnya sehingga ekonomi hijau, yang terderivasi menjadi green growth, di Indonesia masih menjadi konsep yang relatif monopolistik tanpa tandangan gagasan intelektual.

Sebelum itu, kita perlu memahami secara singkat intisari dari gagasan ekonomi hijau. Inti dari konsep ekonomi hijau terletak pada gagasan yang lebih fundamental "triple bottom line", yang menekankan keseimbangan pertumbuhan manusia, keberlanjutan planet Bumi, dan keuntungan ekonomis dalam semua upaya kegiatan ekonomi (Miller, 2020). Ekonomi hijau sebenarnya berupaya mengatasi kekurangan model ekonomi tradisional yang sering kali mengabaikan preservasi lingkungan hidup dan lingkungan sosial kemanusiaan untuk jangka panjang dari kegiatan ekonomi. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam praktik bisnis dan pembuatan kebijakan, ekonomi hijau diekspektasikan dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih adil, terutama untuk lingkungan hidup (Miller, 2020).

Namun, penerapan ekonomi hijau semakin meragukan dan juga dirusak oleh sejumlah tantangan. Salah satu hambatan paling signifikan adalah fenomena greenwashing yang semakin hari semakin meluas, terutama pada industri fesyen, di mana perusahaan secara keliru mengklaim ramah lingkungan untuk meningkatkan citra publik mereka dan mendapatkan kembali perhatian konsumen (Adamkiewicz, Kochanska, Adamkiewicz, & Lukasik, 2022).

Greenwashing ini mencederai kredibilitas konsep ekonomi hijau dan mengikis kepercayaan publik terhadap triple bottom line yang juga berfokus pada gerakan keberlanjutan lingkungan. Lebih dari itu, gagasan ekonomi hijau (green growth) yang diharapkan dapat memberikan pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan, paling tidak memiliki lima kelemahan mendasar, yaitu (1) kesulitan, atau bahkan ketidakmungkinan, mengukur harga jasa ekologis secara pasti dalam kegiatan ekonomi; (2) efisiensi teknologi dalam memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup; (3) pertumbuhan hijau yang pada praktiknya tetap mengedepankan keuntungan ekonomi di atas keberlanjutan lingkungan; (4) status quo sistem ekonomi global yang saat ini masih menawarkan perlindungan yang rendah bagi kelompok rentan (vulnerable class); dan (5) pasar dunia yang saat ini menghadapi tantangan untuk melakukan transformasi signifikan ke arah perlindungan ekologis (Wilson, 2019).

Banyak kritik dan kekhawatiran global bahwa ekonomi hijau berpotensi menimbulkan determinisme teknologi dalam pembangunan berkelanjutan yang dijanjikan oleh ekonomi hijau. Hal tersebut kurang lebih tercermin dari adiksi pemerintah di banyak negara untuk mengadopsi kendaraan listrik tanpa memperhatikan lebih lanjut kemampuan masyarakat untuk membeli teknologi tersebut. Meskipun kemajuan teknologi dapat memainkan peran penting dalam mendorong solusi berkelanjutan, mengandalkan perbaikan dan kemajuan teknologi semata dapat mengabaikan kebutuhan akan perubahan sistemik dan keadilan sosial. Lebih jauh lagi, ekonomi hijau sering dikritik karena memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada perlindungan lingkungan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang komitmennya yang sebenarnya terhadap keberlanjutan. Transisi ke ekonomi hijau dapat juga berdampak signifikan pada populasi yang rentan, termasuk hilangnya pekerjaan di industri tradisional dan distribusi manfaat yang tidak merata. Memastikan bahwa ekonomi hijau memberi manfaat bagi semua segmen masyarakat memerlukan pertimbangan cermat tentang keadilan sosial dan kebijakan transisi yang adil.

Selain itu, kesenjangan global dalam pembangunan ekonomi dan akses sumber daya menimbulkan tantangan signifikan bagi penerapan ekonomi hijau. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi prioritas yang saling bersaing, yaitu pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga sulit untuk berinvestasi dalam praktik-praktik yang berkelanjutan. Kesenjangan Utara-Selatan dalam hal kemampuan teknologi, sumber daya keuangan, dan

kapasitas kelembagaan semakin mempersulit upaya mencapai ekonomi hijau global (Sachs, Lafortune, & Fuller, 2024). Ekonomi hijau telah menjadi sasaran kritik yang lebih luas yang mempertanyakan asumsi dan nilai-nilai yang mendasarinya. Beberapa berpendapat bahwa ekonomi hijau pada dasarnya kurang masuk akal karena ketergantungannya pada mekanisme berbasis pasar dan kegagalannya dalam mengatasi akar penyebab degradasi lingkungan. Kritik lain berpendapat bahwa ekonomi hijau hanyalah pengemasan ulang paradigma pertumbuhan ekonomi tradisional, yang melanggengkan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan dan ketimpangan sosial. Ekonomi hijau, pada akhirnya, menghadirkan lanskap yang kompleks dan beraneka ragam. Meskipun menawarkan visi konseptual yang menjanjikan untuk masa depan yang berkelanjutan, realisasinya penuh dengan tantangan dan kontradiksi (Wilson, 2019; Schmelzer, Vetter, & Vansitjan, 2022). Permasalahan-permasalahan seperti greenwashing, pengukuran dampak, determinisme teknologi, keadilan sosial, kesenjangan global, dan kritik yang lebih luas terhadap ekonomi hijau perlu direspon, dikaji secara lebih komprehensif, dan dibangun anti-tesis yang memiliki perspektif berkeadilan global.

Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami berusaha mengenalkan kembali sekaligus melakukan amplifikasi akademis pada salah satu gagasan kritis de-growth. Gagasan de-growth kembali populer dan pernah menjadi manifestasi pemulihan pasca-pandemi pada tahun 2020 sebagai bentuk re-orientasi ekonomi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. De-growth memiliki perbedaan epistimologis ketimbang green growth, gagasan derivatif dari ekonomi hijau, dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan people, planet, dan profit. Oleh karena itu, selain melakukan kritik epistemik, de-growth juga memperkaya diskursus ekonomi makro global. Pada tataran praktis, Sam Alexander dari University of Melbourne dan Jason Hickel dari University of London, menyampaikan bahwa de-growth bukan berarti hidup di gua menggunakan lilin tapi lebih kepada memulai ekonomi dengan lebih lambat dan lebih sedikit energi (Masterson, 2022). De-growth juga berarti orang kaya juga harus memberikan lebih kepada kelas sosial yang lain dan juga alam. De-growth kemudian menjadi sebuah gagasan yang kami anggap memiliki relevansi pada masa kini.

Artikel ini ditulis dengan pendekatan kualitatif dan instrumen studi kepustakaan. Artikel ini juga akan lebih fokus memotret perkembangan narasi gagasan de-growth secara global dan di Indonesia sebagai orientasi nilai

kebijakan tata kelola ekonomi makro pasca-pandemi. Kami juga memberikan beberapa studi kasus dan proyeksi konseptual di industri pariwisata, khususnya di Indonesia, sehingga studi kasus tersebut dapat menjadi penguat empiris untuk manifestasi gagasan de-growth, baik pada industri pariwisata maupun sektor atau industri lainnya.

Mengenalkan (Kembali) De-growth

Ketimbang ekonomi hijau dan derivasinya, yaitu green growth, de-growth menawarkan perspektif terperinci lain untuk mencapai aspek yang lebih seimbang antara manusia, planet, dan kesejahteraan (Kallis, et al., 2018). Setidaknya ada lima usulan kebijakan utama dari gagasan de-growth, yaitu (1) pergeseran dari pertumbuhan PDB agregat yang terfokus untuk membedakan antara sektor-sektor penting guna menumbuhkan investasi, seperti energi, pendidikan, dan sektor publik yang penting; (2) membiasakan redistribusi dengan membangun sistem kebijakan sosial universal dan adanya pengakuan urgensi pelayanan publik (public service) dan barang publik (public goods) yang penting; (3) pertanian regeneratif yang memprioritaskan konservasi keanekaragaman hayati, nilai-nilai lokal, dan lapangan kerja yang adil; (4) pengurangan konsumsi dan perjalanan yang boros; (5) pembatalan utang dan peralihan ke sistem keuangan yang lebih progresif (Schmelzer, Vetter, & Vansitjan, 2022). Singkatnya, de-growth berfokus pada peningkatan kondisi ekologis, peningkatan kesejahteraan manusia, dan perubahan mendasar yang mengatasi cara produksi kapitalis melalui pengurangan skala dan distribusi ulang.

Timothée Parrique menguraikan de-growth menjadi tiga definisi. Pertama, definisi lingkungan yang mengkarakterisasikan de-growth sebagai kemunduran. Kemunduran mengacu pada pembatasan kebiasaan produksi dan konsumsi yang berlebihan, yang mengarah pada peningkatan pemborosan dan eksploitasi planet yang eksploitatif. Yang kedua adalah definisi revolusioner, yang berarti emansipasi seluruh masyarakat untuk terlibat dalam sistem ekonomi mereka guna meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan mereka. Definisi ketiga bersifat utopis, yang melihat de-growth sebagai tujuan atau metode yang paling sesuai dengan semua pembangunan ekonomi di seluruh dunia (Parrique, 2023). Berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyoroti satu fitur penting dari de-growth, yakni proses demokrasi. Oleh karena itu, de-

growth terkadang dianggap lahir dari perspektif ekonomi mikro yang erat juga kaitannya dengan demokratisasi ekonomi (Cattaneo, D'Alisa, Kallis, & Zografos, 2012). Proses demokrasi ini menggarisbawahi proses transformasi dengan mempertimbangkan kembali keadilan & keberlanjutan ekologi global, memperkuat keadilan sosial dan independensi, serta mendesain ulang kelembagaan dan infrastruktur publik untuk mengurangi ketergantungan pada ekspansi ekonomi yang ekstrem (Schmelzer, Vetter, & Vansitjan, 2022). Oleh karena itu, kata kunci yang digunakan untuk mencapai tujuan de-growth adalah perubahan sistemik, keadilan ekologi, keadilan sosial, independensi, dan kemandirian pertumbuhan. Pada tataran global, de-growth berarti integrasi dalam hubungan simbiosis yang saling menguntungkan, bukan ketergantungan struktural. Oleh karena itu, negara-negara global north tidak boleh lagi memindahkan tuntutan dan masalah ekonominya ke negara-negara global south (Schmelzer, Vetter, & Vansitjan, 2022).

Pada belahan bumi bagian selatan, untuk negara-negara global south, penggunaan konsep de-growth beserta manifestasinya dimanfaatkan untuk mempertahankan dan membangun kembali masyarakat lokal seperti yang sudah banyak diimplementasikan pada sektor pariwisata. Ekonomi di global south bisa saja memerlukan perubahan radikal untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara di bagian utara atau global north. Perubahan radikal untuk global south bisa berbentuk kesetaraan yang radikal (Higgins-Desbioles, 2022). Kesetaraan radikal itulah yang menjadi visi sekaligus alasan mengapa muncul gagasan de-growth di beberapa negara, seperti di Turki (Akbulut, 2019) dan di India, bagian Kerala (Pansera & Owen, 2018). De-growth juga dipercaya dapat mendesentralisasi, mendistribusikan, dan melokalisasi seluruh lingkungan dalam sistem sirkular dengan keterlibatan masyarakat lokal menjadi intinya. Artinya, dengan mengimplementasikan de-growth maka masyarakat lokal dapat merebut kembali identitas juga kepemilikan atas tanah mereka. Pada industri pariwisata, de-growth juga dapat menganulir komodifikasi lebih eksploitatif karena memperlambat prospek ketergantungan masyarakat lokal dengan investor besar (Demaria, Kallis, & & Bakker, 2019). Hal ini dapat tercermin dalam Komunitas Kichwa Anãgu di Ekuador yang meningkatkan industri pariwisata dengan mengembangkan konsep pariwisata berbasis masyarakat mereka, dan difokuskan pada perbaikan seluruh aspek yang ada di sumber daya manusia mereka, termasuk upah yang layak,

kemandirian ekonomi, dan konservasi serta preservasi lingkungan. Melalui pariwisata yang berjalan lambat ini, masyarakat Kichwa Anãgu dapat merebut kembali budaya mereka dan mengemasnya sebagai objek wisata edukasi, mulai dari bahasa lokal hingga atraksi budaya lainnya. Konsep dan mekanisme kerja komunitas mereka terkait erat dengan kearifan lokal mereka dan mereka juga membatasi jumlah wisatawan. Ketergantungan pariwisata memang bisa menjadi bom waktu yang dapat bergulir ke dasar terburuknya, sehingga bisa saja membongkar reklamasi komunal yang diinginkan oleh masyarakat lokal dengan prinsip de-growth (Renkert, 2019).

Gagasan De-growth sebagai Resep Penanggulangan Krisis?

Kami merasa bahwa menjadi penting untuk membahas keterkaitan krisis global, khususnya perubahan iklim, dan pentingnya memikirkan kembali masa depan pariwisata melalui lensa keadilan dan solidaritas saat ini. Kita hampir tidak bisa mengabaikan argumen bahwa perubahan iklim adalah krisis yang meluas dengan konsekuensi yang luas, yang mencakup berbagai masalah lain seperti konflik sosial, resesi ekonomi, dan kelangkaan sumber daya (Rastegar, Higgins-Desbioles, & Ruhanen, 2023). Lebih jauh, kita perlu menyadari pentingnya mempertimbangkan beragam perspektif budaya dan pandangan dunia untuk memahami akar penyebab krisis ini dan mengembangkan solusi yang efektif. Sulit juga bagi kita untuk mengklaim bahwa kearifan masyarakat adat, yang telah mengalami kesulitan krisis serupa karena kolonialisme, diklaim menjadi sangat berharga dalam mengatasi tantangan saat ini. Konsep solidaritas, baik pada dimensi global maupun lokal, diperkenalkan sebagai hal yang penting untuk mengatasi krisis global, dengan menekankan aspek relasionalnya berupa kerja sama dan kesamaan. Penting untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut pada sektor pariwisata untuk menumbuhkan pemahaman antarbudaya dan berkontribusi pada perdamaian dan solidaritas, sambil menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan bagi upaya manifestasi de-growth.

Beberapa konsep yang lebih teknis dan praksis sebenarnya juga penting untuk terus-menerus ditanamkan dan diimplementasikan pada sektor pariwisata, seperti pariwisata berkelanjutan, desa wisata, pariwisata lambat (slow tourism), pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism), dan pariwisata yang bertanggung jawab (responsible tourism). Konsep-konsep

praksis tersebut lebih berlandaskan pada keadilan sehingga pembangunan berkelanjutan dengan de-growth sebagai kerangka pemikirannya dapat diimplementasikan dan juga berpihak secara nyata. Peran serta partisipasi masyarakat dalam pariwisata berbasis masyarakat, desa wisata, pariwisata lambat, dan pariwisata bertanggung jawab diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih dalam dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan yang berkeadilan sosial dan ekonomi. Sektor pariwisata Indonesia sebenarnya sudah mulai memanifestasikan de-growth pada beberapa lokasi pariwisata, contohnya ada di Raja Ampat dan Nusa Penida.

Terletak di wilayah Papua Barat, salah satu provinsi di Indonesia, Raja Ampat muncul sebagai salah satu surga wisata bahari dunia sekarang ini. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Papua Barat mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Menyadari kebutuhan mendesak untuk diversifikasi pemerintah saat itu memperjuangkan pengembangan sektor pariwisata di Raja Ampat. Landasan strategi peningkatan ekonomi ini melibatkan keterlibatan masyarakat lokal yang aktif dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya Papua yang kaya dan lingkungan alam yang tak tertandingi. Untuk mengkatalisasi transformasi ini, sebuah festival peliputan konservasi keanekaragaman hayati Raja Ampat diluncurkan perdana pada tahun 2009, yang menandai momen penting dalam lintasan pariwisata wilayah tersebut (Hutauruk & Harto, 2017). Festival yang sukses tersebut mampu memberikan sorotan global kepada Raja Ampat. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik kawasan tersebut sebagai tujuan wisata internasional utama sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah yang teguh terhadap rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Upaya ini sejalan dengan paradigma de-growth yang sedang berkembang, yang menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan aktivitas ekonomi manusia dengan pelestarian lingkungan hidup. Dengan menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang signifikansi ekologis Raja Ampat dan sikap proaktif negara terhadap aksi iklim, festival tersebut berfungsi sebagai katalisator untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dukungan bagi praktik-praktik pariwisata berkelanjutan, terutama di Indonesia (Mulyanto, 2022).

Raja Ampat, meskipun terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya yang tak tertandingi, memiliki biaya kunjungan/pariwisata yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, seperti Nusa Penida di

Provinsi Bali dan Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atraksi wisata bahari, seperti berenang dengan ikan pari dan pengalaman menyelam di laut, yang memikat sebagian besar wisatawan, merupakan daya tarik utama pariwisata Raja Ampat. Namun demikian, meskipun terjadi lonjakan kunjungan wisatawan yang signifikan, Raja Ampat juga sempat bergulat dengan kebocoran pendapatan karena pengawasan dari pengelola yang tidak memadai, dan sekali lagi menjadi dampak negatif dari adanya overtourism (King, 2017). Peningkatan jumlah wisatawan yang sangat signifikan, terutama untuk objek wisata selam, menunjukkan perlunya membatasi dampak kegiatan pariwisata yang berlebihan tersebut, terutama untuk menjaga ekosistem lingkungan hidup yang ada disana. Dengan mempertimbangkan daya dukung yang ada dan memprioritaskan konservasi, penerapan prinsip-prinsip de-growth dapat membantu mengatur jumlah dan intensitas pengunjung untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak mengorbankan kualitas ekosistem yang ada. Daya dukung ekosistem merupakan isu krusial di Raja Ampat, khususnya yang menyangkut kegiatan snorkeling dan menyelam (diving) karena berkaitan erat dengan terumbu karang dan spesies laut. Lonjakan pengunjung, sebenarnya pada destinasi apapun dan manapun, memerlukan pengelolaan yang cermat untuk memastikan keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup yang ada.

Gambaran situasi pariwisata Raja Ampat di atas menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Meskipun biaya masuk yang tinggi dapat mengurangi dampak pariwisata massal, struktur biaya ini juga berpotensi menciptakan kesenjangan dalam aksesibilitas dan keragaman pengalaman wisata. Prinsip de-growth, yang menekankan pada pengurangan dampak lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan pendekatan yang lebih terpadu untuk mengelola destinasi wisata seperti Raja Ampat. Mengadopsi perspektif de-growth di Raja Ampat dapat diartikan bahwa pengelolaan wisata harus berfokus pada kualitas pariwisata daripada kuantitas, memastikan bahwa kegiatan pariwisata dikelola dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak ekologis sambil memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal, termasuk mendukung proyek konservasi, mengembangkan inisiatif pelatihan bagi penduduk lokal, dan menciptakan model pariwisata yang menawarkan pengalaman mendalam tanpa eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Pendekatan ini dapat menjadikan Raja Ampat sebagai contoh

bagaimana prinsip-prinsip de-growth dapat diterapkan untuk menciptakan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia. Penerapan pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat, yang mengadopsi prinsip-prinsip de-growth, sebenarnya bisa memunculkan beberapa potensi mekanisme pengelolaan pariwisata yang dapat diterapkan di desa-desa wisata Indonesia untuk pencapaian skala yang lebih luas. Potensi ini difokuskan pada upaya memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari wisatawan bagi masyarakat setempat, memaksimalkan pelestarian lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Selain Raja Ampat di Papua Barat, tentu saja ada juga Nusa Penida di Bali.

Kepulauan Nusa Penida, kawasan dengan nilai ekologi dan budaya yang populer di Bali, Indonesia, saat ini juga menghadapi tantangan yang semakin besar dalam melestarikan keanekaragaman hayati lautnya. Meskipun ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan klasifikasi International Union for Conservation of Nature (IUCN), sumber daya alam pulau-pulau tersebut sebagian besar masih belum memiliki regulasi yang jelas (Suhardono, Sianipar, Suryawan, Septiariva, & Prayogo, 2024). Hal ini diperburuk oleh praktik-praktik yang tidak merusak lingkungan dan ekosistem perairan di sana. Dengan pertumbuhan populasi dan industri pariwisata, tekanan pada ekosistem yang rapuh ini semakin meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat dan lembaga setempat berupaya menerapkan strategi konservasi yang efektif, termasuk berbagi pengetahuan dan inisiatif pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepada masyarakat lokal. Dengan mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati laut, Nusa Penida dapat memastikan kesejahteraan ekologi dan ekonominya dalam waktu yang lebih panjang. Kepulauan ini, yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada perikanan dan budidaya rumput laut, menghadapi ancaman dari penangkapan ikan ilegal, polusi, penambangan karang, dan perubahan iklim (Welly, 2022). Dengan sekitar 200.000 wisatawan asing maupun domestik setiap tahunnya, perlu adanya kerangka kebijakan besar sebagai solusi yang bertujuan untuk mengurangi ancaman kerusakan lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan mata pencaharian lokal yang ada disana (Welly, 2022).

Mengimplementasikan perspektif de-growth berarti mendukung pariwisata berkelanjutan dan responsible tourism di Nusa Penida. Pertumbuhan

pariwisata di Nusa Penida harus dikelola atau dibatasi demi konservasi alam dan pelestarian lingkungan. Tindakan manusia, apalagi dalam jumlah yang banyak, sangat penting bagi keberhasilan visi KKP Nusa Penida. Penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, dan pembangunan berlebihan di kawasan pesisir, yang tentunya didorong oleh aktivitas manusia, sangat bisa mengancam ekosistem pesisir yang vital bagi kesejahteraan manusia (Nie, et al., 2023). Untuk mengelola KKP Nusa Penida secara efektif, memahami perilaku manusia, termasuk faktor ekonomi dan sosial, sangatlah penting. Pengetahuan tentang perilaku manusia dapat memfasilitasi pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat nelayan setempat dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan yang ada di KKP Nusa Penida. Pada akhirnya hal tersebut dapat mengarah pada KKP Nusa Penida yang lebih sukses dan berkelanjutan. Terdapat kurang lebih tiga kegiatan konkret yang telah dilaksanakan di KKP Nusa Penida untuk mempertahankan kualitas ekosistem perairan disana. Hal pertama adalah pengelolaan zona perairan, yang kedua adalah partisipasi masyarakat setempat, dan yang ketiga adalah peningkatan organisasi yang menaungi, terlibat, dan memiliki tanggung jawab atas KKP Nusa Penida (Suhardono, Sianipar, Suryawan, Septiariva, & Prayogo, 2024).

Pengelolaan zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida merupakan komponen penting dari strategi pengelolaan Nusa Penida. Dengan menetapkan empat zona yang berbeda, masing-masing dengan pembatasan khusus terhadap aktivitas manusia, KKP Nusa Penida berupaya menyeimbangkan tujuan konservasi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Zona larangan tangkap, tempat semua aktivitas ekstraktif dilarang, sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan kesehatan serta kualitas ekosistem. Zona pariwisata bahari, budidaya rumput laut, dan pemanfaatan terbatas komoditas perikanan memungkinkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sambil meminimalkan dampak lingkungan hidup didalamnya. Untuk memastikan implementasi yang efektif, peraturan daerah yang disesuaikan dengan keadaan unik Nusa Penida sudah seharusnya diperlukan (Suhardono, Sianipar, Suryawan, Septiariva, & Prayogo, 2024). Peraturan-peraturan tersebut akan memberikan kerangka hukum untuk menegakkan rencana zonasi dan memperkuat aturan yang mengatur setiap zona. Selain itu, konsultasi publik dengan pengusaha pariwisata bahari, nelayan,

dan petani rumput laut juga sangat perlu dilakukan untuk mengumpulkan wawasan, pengetahuan, dan kearifan lokal, yang juga bisa mendorong keterlibatan pemangku kepentingan lain selain pemerintah.

Rencana zonasi KKN Nusa Penida juga menetapkan batasan waktu khusus untuk aktivitas tertentu. Penangkapan ikan diizinkan mulai pukul 4 pagi hingga 9 pagi, dengan menggunakan metode tradisional seperti pancing, jaring, dan tombak. Namun, mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore, fokus beralih ke kegiatan pariwisata, termasuk menyelam, snorkeling, dan wisata budaya. Pembagian waktu ini membantu meminimalkan konflik antara penangkapan ikan dan pariwisata serta memastikan bahwa kedua sektor tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan. Sebagai pengakuan atas signifikansi budaya dan spiritualitas pulau Bali, "zona suci" khusus telah ditetapkan di dalam KKP Nusa Penida. Zona ini melarang kegiatan penangkapan ikan dan dicadangkan untuk upaya rehabilitasi, fotografi, dan patroli laut. Konsep peradaban Bali, yakni tri hita karana, yang menekankan keharmonisan antara manusia, dewa, dan alam, mendukung pengembangan potensi laut dan pariwisata di KKP Nusa Penida. Perayaan Nyepi Segara (Hari Raya Nyepi) tahunan di Bali juga berfungsi dan dapat dipandang sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk melestarikan lingkungan laut dan mempromosikan praktik berkelanjutan (Suhardono, Sianipar, Suryawan, Septiariva, & Prayogo, 2024). Dengan menyeimbangkan konservasi dan pembangunan ekonomi secara cermat melalui zonasi, partisipasi publik, dan pembatasan waktu, KKP Nusa Penida dapat menjadi model pengelolaan laut berkelanjutan di Indonesia yang berusaha mengadaptasi perspektif de-growth. Dimasukkannya zona suci semakin menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam upaya konservasi dan memperkuat komitmen pulau terhadap pengelolaan lingkungan.

Kedua, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, KKP Nusa Penida dapat meningkatkan legitimasinya dan meningkatkan kemungkinan kepatuhan masyarakat lokal terhadap peraturan yang ada. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan adaptif dan telah terbukti meningkatkan hasil konservasi (Berdej & Armitage, 2016). Tentu saja partisipasi masyarakat lokal telah menjadi bagian integral bahkan yang penting ketika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat (Tranggono, Nuryananda, & Putra, 2021; Nuryananda & Berlianty, 2023; Nuryananda & Al Fitriani, 2023). Partisipasi masyarakat merupakan dan akan

terus menjadi landasan keberhasilan pariwisata berkelanjutan di KKP Nusa Penida. Masyarakat lokal, sebagai pemangku kepentingan utama, memainkan peran penting dalam memandu pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Keterlibatan mereka tidak hanya mendorong keberlanjutan jangka panjang tetapi juga mengurangi degradasi lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Dengan mendorong keterlibatan masyarakat, inisiatif berkelanjutan di KKP Nusa Penida berfungsi sebagai model untuk praktik pariwisata berkelanjutan (Suhardono, Sianipar, Suryawan, Septiariva, & Prayogo, 2024). Partisipasi aktif masyarakat lokal memastikan pelestarian warisan budaya, sementara pengetahuan dan pengalaman mereka berkontribusi pada pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan pentingnya melibatkan penduduk lokal dalam upaya konservasi untuk mencapai hasil pariwisata yang berkelanjutan dan adil.

Ketiga, pengelolaan KKL Nusa Penida yang efektif, sehingga dapat menekan dampak negatif kepada ekosistem perairan, memerlukan kerangka kerja yang terstruktur dengan baik yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Pendanaan yang memadai juga penting untuk mendukung upaya penjangkauan, pelatihan, dan pengawasan. Pendapatan yang dihasilkan dari biaya masuk dapat digunakan untuk mempertahankan kegiatan ini dan memastikan kesejahteraan KKP Nusa Penida dalam jangka panjang. Pengelolaan masalah sampah di area pariwisata, terutama selama musim hujan, sangat penting juga untuk melestarikan ekosistem laut dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan. Kolaborasi antara penyedia layanan pariwisata, pemerintah daerah, organisasi pengelolaan sampah, dan kelompok masyarakat dapat secara signifikan mengurangi masalah ini. Dengan menerapkan inisiatif pembersihan kolektif dan mempromosikan praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, KKP Nusa Penida dapat menjaga lingkungan lautnya, meningkatkan pengalaman pariwisata, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat (Suhardono, Sianipar, Suryawan, Septiariva, & Prayogo, 2024).

Penutup

Ekonomi hijau, sebuah pergeseran paradigma global menuju pembangunan berkelanjutan, saat ini menghadapi tantangan epistemologis yang signifikan. Sementara para pendukung ekonomi hijau berpendapat bahwa

ekonomi hijau berpotensi menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, pihak penantang ekonomi hijau menunjuk pada isu-isu seperti greenwashing, determinisme teknologi, dan ketidaksetaraan global. De-growth, sebagai alternatif dari ekonomi hijau dan green growth sebagai derivasinya, menawarkan pendekatan yang lebih radikal. Pendekatan ini menekankan pengurangan produksi dan konsumsi yang berlebihan, terutama dari negara-negara di global north, mendistribusikan kembali kekayaan, mempromosikan agrikultur yang regeneratif, dan mengurangi konsumsi dan perjalanan yang tidak bertanggungjawab. De-growth merupakan gagasan yang memang menekankan juga pada demokratisasi kapital sehingga ekonomi yang terlalu cepat harus diperlambat, namun bukan berarti harus merugi.

Perlu pendekatan yang lebih adil dan setara untuk mengatasi tantangan lingkungan dan ekosistem kehidupan makhluk hidup di bumi. Keuntungan ekonomi yang tidak terbatas (infinite) dibantah dengan argumentasi bahwa sumber daya yang disediakan oleh Bumi adalah terbatas. Maka, gagasan de-growth dapat berkontribusi pada pembentukan masa depan yang lebih seimbang dengan berfokus pada keadilan ekologis, keadilan sosial, dan kemandirian seluruh komunitas masyarakat. Artikel ini kemudian juga memberikan contoh bagaimana prinsip de-growth dapat diterapkan di sektor pariwisata Indonesia, seperti di Raja Ampat, Papua Barat, dan Nusa Penida, Bali. Pada studi kasus Raja Ampat, destinasi wisata bahari yang populer, pemerintah pusat dan daerah telah melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam upaya konservasi lingkungan hidup. Dengan berfokus pada pariwisata berkualitas dan meminimalkan dampak ekologis, Raja Ampat dapat menjadi model pariwisata berkelanjutan. Sementara Nusa Penida, destinasi wisata populer lainnya, menghadapi tantangan serupa dalam melestarikan keanekaragaman hayati laut. Namun dengan penerapan strategi konservasi yang efektif, termasuk pengelolaan zonasi, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan limbah, Nusa Penida dapat memastikan kesejahteraan ekologis dan ekonominya. Raja Ampat dan Nusa Penida bisa jadi akan terus menjadi battleground antara ekonomi hijau dengan gagasan de-growth, apalagi jika dikaitkan dengan krisis global, termasuk perubahan iklim, dan pentingnya memikirkan kembali masa depan pariwisata yang ramah lingkungan.

Di luar pariwisata, prinsip de-growth dapat diterapkan ke berbagai sektor ekonomi. Dalam bidang pertanian, misalnya, de-growth dapat

mendukung praktik pertanian regeneratif yang memprioritaskan keanekaragaman hayati, kesehatan tanah, dan sistem pangan lokal. Hal seperti itu sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh para leluhur kita dalam pertanian tradisional (traditional farming). Dalam bidang energi, de-growth dapat mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tentunya. Dalam bidang transportasi, de-growth dapat mendorong moda transportasi berkelanjutan seperti berjalan kaki, bersepeda, dan angkutan umum yang sudah banyak diadopsi oleh negara-negara maju. Tentu saja penerapan de-growth memerlukan perubahan sistemik yang signifikan. Hal ini melibatkan pemikiran ulang prioritas ekonomi, mendistribusikan ulang kekayaan, dan menantang budaya konsumerisme yang dominan dan berlebihan. Meskipun de-growth mungkin menghadapi perlawanan dari kepentingan yang kuat, namun secara konseptual ia juga menawarkan jalur yang lebih berkelanjutan dan adil untuk masa depan.

Kami rasa penting untuk memunculkan kembali konsep atau gagasan praksis de-growth sebagai pendekatan yang bisa jadi lebih efektif dan berkeadilan untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup. Dengan berfokus pada pengurangan konsumsi berlebihan, pendistribusian ulang kekayaan dan kesejahteraan, mempromosikan pertanian berkelanjutan, dan memprioritaskan keadilan ekologis dan sosial, de-growth nampak menjadi gagasan tandingan yang tangguh untuk ekonomi hijau. De-growth juga menjadi cerminan bahwa membuat dunia lebih adil merupakan sebuah tantangan intelektual yang cukup kompleks dan memerlukan energi yang besar, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan manusia dan planet Bumi. Maka, dengen menghadirkan gagasan tandingan de-growth, kami berharap bahwa dialektika praksis akan muncul dan memberikan dampak intelektual yang bermanfaat bagi diskursus ini.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para kolaborator dari UPN "Veteran" Jawa Timur, Yayasan Abyakta Acitya Bhumi, dan Universitas Pertamina, sehingga kolaborasi ini dapat terwujud dan semoga menjadi salah satu amplifikasi keadilan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia berdasarkan perspektif baru. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jurnal Sosial Soedirman atas kesempatan yang telah diberikan.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

Adamkiewicz, J., Kochanska, E., Adamkiewicz, I., & Lukasik, R. M. (2022). Greenwashing and sustainable fashion industry. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, Vol. 38.

Akbulut, B. (2019). The 'state' of degrowth: Economic growth and the making of state hegemony in Turkey. Environment and Planning E: Nature and Space, 2(3).

Berdej, S., & Armitage, D. (2016). Bridging for Better Conservation Fit in Indonesia's Coastal-Marine Systems. Diambil dari: frontiersin.org: https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2016.00101/full

Cattaneo, C., D'Alisa, G., Kallis, G., & Zografos, C. (2012). Degrowth Futures and Democracy. Futures 44, 515-523.

Demaria, F., Kallis, G., & & Bakker, K. (2019). Geographies of degrowth: Nowtopias, resurgences and the decolonization of imaginaries and places. Environment and Planning E: Nature and Space, 2(3), 431-450.

Dewi, R. (2023, Juli 14). Pengertian Ekonomi Hijau, Konsep, Tujuan, dan Manfaatnya. Diambil dari: koran.tempo.co: https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483198/pengertian-ekonomi-hijau-konsep-tujuan-dan-manfaatnya

Higgins-Desbioles, F. (2022). The ongoingness of imperialism: The problem of tourism dependency and the promise of radical equality. Annals of Tourism Research, Vol. 94.

Hutauruk, A., & Harto, S. (2017). Pengaruh Kunjungan Wisatawan Asing terhadap Ekonomi Pariwisata Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 4, No. 2, 1-14.

Kallis, G., Kostakis, V., Lange, S., Muraca, B., Paulson, S., & Schmelzer, M. (2018, May 31). Research On Degrowth. Annual Review of Environment and Resources, pp. 291-316.

King, C. (2017). Tourism in Raja Ampat: New Chances and Challenges. Diambil dari: https://digitalcollections.sit.edu/:

https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=3641&context=isp_collection

Leanerts, K., Tagliapietra, S., & Wolff, G. B. (2022). The Global Quest for Green Growth: An Economic Policy Perspective. Sustainability 14(9).

Masterson, V. (2022). Degrowth – what's behind the economic theory and why does it matter right now? Diambil dari: www.weforum.org: https://www.weforum.org/agenda/2022/06/what-is-degrowth-economics-climate-change/

Miller, K. (2020, December 8). The Triple Bottom Line: What It Is & Why It's Important. Diambil dari: https://online.hbs.edu/: https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-the-triple-bottom-line

Mulyanto, R. (2022). Indonesia's Raja Ampat: balancing tourism with protecting the sea. Diambil dari: asia.nikkei.co: https://asia.nikkei.com/Business/Travel-Leisure/Indonesia-s-Raja-Ampat-balancing-tourism-with-protecting-the-sea

Nie, X., Su, Y., Wang, H., Lyu, C., Wu, X., Li, X., . . . Gao, W. (2023). Will short-term constraints affect long-term growth? Empirical analysis from the Beibu Gulf Mangrove National Natural Reserve of China. Ocean & Coastal Management, 239, 10661.

Nuryananda, P. F., & Berlianty, E. Z. (2023). Totem Pro Parte: Narratives of Segunung Traditional Village in Adapting Digital Technology for Tourism. Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata, Vol. 10, No. 2.

Nuryananda, P. F., & Al Fitriani, A. Q. (2023). Permasalahan Kultural dan Pentingnya Kontekstualisasi dalam Penerapan Teknologi dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Segunung. Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya, Vol. 14, No. 2, 104-114.

Pansera, M., & Owen, R. (2018). Innovation for de-growth: A case study of counter-hegemonic practices from Kerala, India. Journal of Cleaner Production, 197(2), 1872-1883.

Parrique, T. (2023). Ralentir ou périr: L'économie de la décroissance. Paris: Edition Seuil.

Rastegar, R., Higgins-Desbioles, F., & Ruhanen, L. (2023). Tourism, global crises and justice: rethinking, redefining and reorienting tourism futures. Journal of Sustainable Tourism, https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2219037.

Renkert, S. R. (2019). Community-owned tourism and degrowth: A case study in the Kichwa Añangu Community. Journal of Sustainable Tourism, 27(12), 1893–1908.

Sachs, J., Lafortune, G., & Fuller, G. (2024). Sustainable Development Report 2024: The SDGs and the UN Summit of the Future. Dublin: Dublin University Press.

Schmelzer, M., Vetter, A., & Vansitjan, A. (2022). The Future is Degrowth: A Guide to a World Beyond Capitalism. New York: Verso.

Suhardono, S., Sianipar, I. M., Suryawan, I. W., Septiariva, I. Y., & Prayogo, W. (2024). Challenges and Opportunities in Developing Sustainable Tourism in Nusa Penida, Indonesia: A Narrative Review of Direct Community Behavior. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Vol. 19, No. 1.

Tranggono, D., Nuryananda, P. F., & Putra, A. Y. (2021). Local Champion: Communication Characteristics in Community Empowerment Based on Local Innovation. JOSAR: Journal of Student Academic Research, Vol. 6, No. 3.

Welly, M. (2022). Marine protected area learning site for the Coral Triangle. Diambil dari: panorama.solutions: https://panorama.solutions/en/solution/marine-protected-area-learning-site-coral-triangle

Wilson, M. (2019). The Green Economy: The Dangerous Path of Nature Commoditization. Consilience: The Journal of Sustainable Development, 21(1), 86-89.